



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN PATI TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2023

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Sebagai upaya penyelarasan proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pijakan yuridis bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan seluruh Perencanaan Pembangunan Daerah.

Implementasi sistem perencanaan pembangunan adalah mewujudkan keterpaduan jalannya roda pembangunan baik fisik maupun non fisik oleh setiap perangkat daerah melalui penyusunan perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam konteks perangkat daerah dilaksanakan dalam wujud perencanaan strategis jangka menengah berupa renstra serta perencanaan tahunan berupa renja. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah berpedoman pada dokumen RPD dalam kaitan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Selanjutnya sebagai penjabarannya maka renstra perangkat daerah dituangkan dalam format rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja perangkat daerah yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja perangkat daerah merupakan instrumen perencanaan kebijakan pembangunan yang mempunyai dua fungsi fundamental bagi keberhasilan

pembangunan, yaitu sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain Renja perangkat daerah inilah acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah dalam waktu 1 (satu) tahun.

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas, selain mengurus urusan rumah tangganya sendiri (administrasi kesekretariatan) juga mengurus atau memfasilitasi urusan administrasi lembaga DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 215 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam setiap menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan tetap mengacu pada Tupoksi dan Ketentuan yang diatur oleh Kepala Daerah dipadukan dengan kebijakan Pimpinan DPRD. Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menegaskan bahwa, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan fasilitasi administrasi yang efektif dan efisien memerlukan pemberdayaan yang melibatkan seluruh aparatur yang berada dalam organisasi Sekretariat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan menentukan keberhasilan serta kelancaran kegiatan DPRD

dalam mewujudkan aspirasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kinerja sekretariat dalam meningkatkan efektivitas administrasi.

Sebagai Bagian dari Pemerintah Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara, maka dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2024.
2. Mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
3. Mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program inovatif yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Memberikan arah kebijakan dan program yang mampu menjembatani antara kondisi riil satuan kerja perangkat daerah dengan program-program

- yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan kabupaten secara menyeluruh;
4. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama rentang waktu 1 (satu) tahun;
 5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja, yaitu sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	P E N U T U P

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pati telah menetapkan 2 Program, 15 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2022. Melihat capaian kinerja tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pati masih dapat memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan dengan baik.

Hasil evaluasi dari rencana Kerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa:

1. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 sebanyak 2 Program, 15 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.
2. Jumlah sub kegiatan tahun 2022 yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 90-100% sebanyak 29 sub kegiatan. Faktor pendukung tercapainya target kinerja karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Terdapat 10 sub kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 70-90%. Faktor penghambat belum tercapainya target karena beberapa kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran terjadi perubahan kegiatan karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu terdapat 2 sub kegiatan dengan capaian di bawah 70% yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan prioritas kegiatan.
3. Program , kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 sampai bulan Desember 2022, secara umum realisasi capaian keuangan sebesar 94,51%, dan untuk realisasi kinerja sebesar 94,51% dengan predikat tinggi, faktor pendukung tercapainya kegiatan adalah kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Sedangkan untuk faktor penghambat karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan beberapa sub kegiatan terkait tugas, pokok dan fungsi DPRD.

Uraian lengkap perkegiatan dapat dilihat di Tabel 2.1. yang merupakan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6) * 100$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4) * 100$
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administra si perkantora n	100%	96,5	100	93,7	93,7	100		
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	100%	2.221	100	88,84	88,84	100		92,7%

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	jumlah rek telepon, air, listrik yang terbayar selama setahun	100%	12	100	83,33	83,33	100		91,4%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	100%	27	100	93,10	93,10	100		95%
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	jumlah premi asuransi Pemeliharaan kesehatan	100%	42	100	84,00	84,00	100		62,59%
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah premi asuransi barang milik daerah	100%	5	100	100,00	100,00	100		88,5%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	100%	36	100	94,74	94,74	100		65,86%

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	luas area kantor yang dibersihkan selama setahun	100%	25	100	96,15	96,15	100		61,66%
	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah kumulatif jenis alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	100%	12	100	83,33	83,33	100		72,14%
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kumulatif jenis barang cetakan dan penggandaan selama setahun	100%	12	100	92,31	92,31	100		85%
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	100%	23	100	95,83	95,83	100		60,2%

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	100%	12	100			100		85%
	penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun	100%	12	100			100		61,3%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	100%	3.811	100	99,90	99,90	100		28,1%
	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah tabung LPG dan pemadam kebakaran yang disediakan	100%	72	100	94,74	94,74	100		72,1%

		selama setahun								
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan selama setahun	100%	4.939	100	98,78	98,78	100		86,7%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun	100%	135	100	100	100	100		95,7%
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan	100%	4	100	66,67	66,67	100		90,7%
	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	jumlah penyelesaian administrasi pengadaan	100%	12	100			100		86,8%

		barang dan jasa selama setahun								
	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang selama setahun	100%	12	100	83,33	83,33	100		85%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.	100%		100			100		82,2%
	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah komulatif mobil jabatan	100%	0	100	0	0	100		89,7%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor	100%	0	100	0	0	100		-
	Pengadaan Tanah	Bertambahnya Luas Tanah Set. DPRD Pati	100%	0	100	0	0	100		55%

	Pengadaan Mebeler	Jumlah komulatif perlengkapan mebeler		0	100	0	0	100		85%
	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah komulatif komputer dan kelengkapannya	100%	4	100			100		20,5%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah area gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala selama setahun	100%	25	100	80,00	80,00	100		86,78%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala selama setahun	100%	36	100	94,74	94,74	100		88,33%
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor		100%	4	100	98	98	100		90,00%

	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin ASN	100%		100			100		59%
	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	100%	180	100	97,56	97,56	100		80,00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai kompetensi dan kualifikasi .	100%		100			100		93,48%
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	jumlah pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan selama setahun	100%	69	100	86,25	86,25	100		75,00%

	Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	jumlah Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan selama setahun	100%	0	100	0	0	100		64,00%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%		100			100		98%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun selama setahun	100%	14	100	97	97	100		100,00%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	jumlah dokumen Pelaporan Semesteran yang	100%	15	100	97	97	100		98,00%

		disusun selama setahun								
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	100%	1	100	99	99	100		94,40%
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen Rencana kerja SKPD yang disusun selama setahun	100%	5	100	99	99	100		85%
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun selama setahun	100%	3	100	98	98	100		85,00%
	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	jumlah dokumen Laporan Perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama	100%	1	100	89	89	100		228,2

		setahun								
	Penyusunan rencana strategik SKPD (Renstra SKPD)	Jumlah dokumen rencana strategik SKPD (Renstra SKPD)	100%	1	100	83,33	83,33	100		82,88%
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%		100			100		90,00%
	Bidang Fungsi Lainnya: Dukungan Fungsi DPRD		100%		100			100		95,45%
	Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat daerah		100%		100			100		80,00%
		Persentase rapat yang sesuai jadwal	100%		100			100		80,00%
		Persentase Pembahasan raperda oleh Dewan yang tepat	100%		100			100		82,60%

		waktu								
	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	jumlah raperda yang dibahas	100%	3	100			100		
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	jumlah dokumen/1 ap pelaksanaan heraing/ dialog yang dilaksanakan selama setahun	100%	11	100	91,67	91,67	100		
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah dokumen/1 ap rapat-rapat alat kelengkapan dewan	100%	210	100			100		
	Rapat-rapat Paripurna	jumlah dokumen/ laporan hasil rapat-rapat paripurna dewan	100%	83	100			100		-
	Kegiatan Reses	jumlah dokumen / laporan kegiatan reses	100%	3	100			100		-

		dalam setahun								
	Penyusunan laporan komisi- komisi	jumlah dokumen / laporan kegiatan komisi- komisi dalam setahun	100%	1.964	100			100		-
	Pengkajian dan pembahasan panitia khusus/komisi	jumlah Pengkajian dan Pembahasa n Pansus/Ko misi dalam setahun	100%	2	100			100		-
	Fasilitasi pendukung kegiatan Badan Kehormatan	jumlah dokumen / lap Kegiatan Anggota Badan Kehormata n	100%	2	100			100		-
	Penyelenggaraan pelantikan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	jumlah Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu yang terselengga	100%	0	100	0	0	100		87%

		ra dalam setahun								
	Penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	jumlah dokumen/1 ap kegiatan DPRD yang terpublikas i dan terdokume ntasi dalam setahun	100%	11	100	91,67	91,67	100		-
	Fasilitasi kegiatan Badan Legislasi Daerah	jumlah dokumen/ lap kegiatan Badan legislasi daerah	100%	5	100	87	87	100		83,33%
	Kajian tunjangan bagi anggota DPRD	Jumlah dokumen kajian tunjangan bagi anggota DPRD	100%	2	100	99	99	100		88,33%
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelesaian raperda	100%	46	100	178	178	100		70,00%
	Penyusunan rencana kerja	jumlah Rancangan	100%	44	100	78	78	100		-

	rancangan peraturan perundang-undangan	Perda yang tersusun dalam setahun								
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	jumlah Kajian Peraturan perundang-undangan yang disusun selama setahun	100%	2	100	100	100	100		85,00%

Tabel 2.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100}{100}$	9	$10 = \frac{(5+7+9)}{3}$	$11 = \frac{(10/4) \times 100}{100}$
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	3.388	256	849	140	16,48	849	1.250	33,8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran,	68	9	19	8	42,1	19	36	52,9

		dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	28	2	7	1	14,2	7	10	35,7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	48	7	12	7	58,3	12	26	54
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokume n administ rasi keuanga n	232	23	58	16	27,5	58	97	41,8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjanga n ASN	112	13	28	8	28,5	28	49	43,7

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	5	12	3	25	12	20	41,6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	5	18	5	27,7	18	28	38,8
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang	48	11	12	8	66,7	12	3164,5	

		Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48	11	12	8	66,7	12	31	64,5
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	640	51	160	29	18,5	160	240	37,5
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	320	0	80	0	0	80	80	25
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbinga	320	51	80	29	36,2	80	160	50

		n Teknis Impleme ntasi Peratura n Perundan g- Undanga n								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokume n penduku ng administ rasi perangka t daerah	664	70	166	24	14,5	166	260	39,1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediak an	96	12	24	8	33,3	24	44	45,8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4	0	1	0	0	1	1	25

		yang Disedi- ak an								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi- ak an	24	2	6	1	16,7	6	9	37,5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedi- ak an	52	6	13	5	38,5	13	24	46,1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- g- Undangan yang Disedi- ak an	48	1	12	1	8,33	12	14	29,1
	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/M	304	24	76	0	0	76	100	32,8

		aterial yang Disediak an								
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu	48	5	12	3	25	12	20	41,6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	48	9	12	6	50	12	27	56,25
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		48	11	12	0	0	12	23	47,9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	12	1	3	1	33,3	3	5	41,6

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	1	3	1	33,3	3	5	41,6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	144	11	36	6	16,7	36	53	36,8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	3	12	2	16,7	12	17	35,4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	48	4	12	2	16,7	12	18	37,5

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	4	12	2	16,7	12	18	37,5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	332	40	83	21	25,3	83	144	43,3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	20	3	5	1	20	5	9	45

		n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajaknya								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya	204	26	51	14	27,4	51	91	44,6
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	4	0	1	0	0	1	1	25
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Pemeliha raan/Reh abilitasi	104	11	26	6	23,07	26	43	41,4

	Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1200	38	300	26	8,6	300	364	30,3
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	200	25	50	13	26	50	88	44
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang	800	13	200	13	6,5	200	226	28,25

		Disediak an								
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikut i Medical Check Up DPRD	200	0	50	0	0	50	50	25
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administ rasi DPRD	48	2	12	1	8,3	12	15	31,25
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordina si dan Konsulta si DPRD	48	2	12	1	8,3	12	15	31,25
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSEN TASE PELAKS ANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.468	90	367			367		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang	96	7	24	6	25	24	37	38,5

		ditetapk an								
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	16	1	4	1	25	4	6	37,5
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	48	5	12	5	41,7	12	22	45,8
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8	1	2	0	0	2	2	25
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	20	0	5	0	0	5	10	50

		Penjela n atau Keterang an dan/atau Naskah Akademi k yang Difasilita si								
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4	0	1	0	0	1	2	50
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		28	1	7	0	0	7	8	28,5
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembaha san APBD	28	1	7	0	0	7	8	28,5
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		288	7	72	7	9,7	72	86	29,9
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an	48	2	12	2	16,7	12	16	33,3

		Urusan Pemerint ahan Bidang Pemerint ahan dan Hukum								
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerint ahan Bidang Infrastru ktur	48	2	12	2	16,7	12	16	33,3
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawas an Urusan Pemerint ahan Bidang Kesejahte raan Rakyat	48	1	12	1	8,33	12	14	29,1
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerint	48	2	12	2	16,6	12	14	29,1

		ahan Bidang Perekono mian								
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawas an Tindak Lanjut Hasil Pemeriks aan Laporan Keuanga n oleh Badan Pemeriks a Keuanga n	4	0	1	0	0	1	1	25
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawas an Pengguna an Anggaran	16	0	4	0	0	4	4	25

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD	200	66	50	66	132	50	182	91
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1248	133	312	56	17,9	312	501	40,1
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan	48	3	12	3	25	12	18	37,5

		Dokumen tasi Dewan								
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	56	0	14	0	0	14	14	25
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	48	6	12	3	25	12	21	43,7
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	48	4	12	4	33,3	12	20	41,6
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	8	1	2	0	0	2	3	37,5
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pokir	612	1	153	0	0	153	153	25

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	600	0	150	0	0	150	150	25
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12	1	3	0	0	3	4	33,3
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	16	1	4	1	25	4	6	37,5
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16	1	4	1	25	4	6	37,5
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi	228	18	57	12	21,05	57	87	38,1

		Tugas DPRD								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48	5	12	3	25	12	20	41,6
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	96	3	24	2	8,33	24	29	30,2
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48	3	12	0	0	12	15	31,25

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48	7	12	7	58,3	12	26	54,1
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	24	0	6	0	0	6	6	25

Tingkat capaian target kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 71,20%. hal ini didukung oleh perencanaan yang tepat dan sumber daya manusia yang cukup berkualitas dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. Demikian juga dengan kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya di atas 80% ini menunjukkan kegiatan dan sub kegiatan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Meskipun demikian ada beberapa hal

yang perlu dilakukan perbaikan ke depan, yaitu terkait penjadwalan dan efisiensi waktu pembahasan Raperda. Kemunduran pelaksanaan rapat menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pengalokasian waktu rapat. Selain itu perubahan jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah juga menjadi salah satu kendala kegiatan tidak bisa berjalan sesuai prioritas.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja selama kurun waktu 2020-2021 capaian kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Patidapat dilihat dibawah ini:

1. Indikator Kinerja Pertama yaitu Persentase Kinerja Dewan yang dipublikasikan pada untuk tahun 2021 target sebesar 100% dan realisasi 95%. Menunjukkan realisasi kinerja sangat tinggi. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 99,71%.
2. Indikator Kinerja Kedua yaitu Peningkatan Persentase Fungsi Legislasi untuk tahun 2021 target sebesar 100%. Dengan capaian Realisasi sebesar 96% hal ini menunjukkan bahwa realisasi tidak memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan kurangnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti kegiatan Pengkajian dan Pembahasan Panitia Khusus yang memerlukan banyak waktu untuk pembahasan namun tidak bisa menyelesaikan kegiatan tersebut karena banyaknya kegiatan DPRD yang lain. Sehingga menyebabkan pembahasan Panitia Khusus sering tertunda. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian kinerja sebesar 93%.
3. Indikator Kinerja Ketiga yaitu Peningkatan Persentase Fungsi Pengawasan untuk tahun 2021, target sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 91% hal ini menunjukkan bahwa realisasi sangat tinggi dan terdapat efisiensi anggaran. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian kinerja sebesar 99%.
4. Indikator Kinerja keempat yaitu Peningkatan Persentase Fungsi Anggaran untuk tahun 2021, target sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 90% hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi sangat tinggi dan terdapat efisiensi anggaran. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian kinerja sebesar 98%.

Pencapaian kinerja pelayanan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n+1) 2025	Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Indikator Tujuan											
	Prosentase kinerja DPRD Kabupaten Pati yang dipublikasikan			100	100	100	100	99,71		100	100	
1.	Indikator Sasaran											
	Persentase Peningkatan fungsi legislasi			95	95	100	100	93		100	100	Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD masih dalam tahap pembahasan, sehingga anggaran untuk pembuatan Buku Tata

												Tertib belum bisa terserap maksimal
	Persentase Peningkatan fungsi anggaran			90	95	100	100	98		100	100	
	Persentase Peningkatan fungsi pengawasan			90	100	100	100	99		100	100	
1.1	Indikator Program											
	Persentase rapat yang sesuai jadwal			90	100	100	100	99		100	100	Rapat dilaksanakan secara zoom dan teleconference
	Persentase pembahasan raperda oleh dewan yang tepat waktu			95	95	100	100	99		100	100	Karena keterbatasan waktu untuk pembahasan

	Persentase penyelesaian raperda			90	95	100	100	88		100	100	Karena menunggu peraturan terbaru terkait dengan raperda yang dibahas supaya tidak terjadi tumpang tindih
--	---------------------------------	--	--	----	----	-----	-----	----	--	-----	-----	---

Tabel 2.2.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n+1) 2025	Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Indikator Tujuan											
	Persentase Kinerja Fungsi DPRD				100	100	100		6,25	100	100	
1.	Indikator Sasaran											
	Persentase rancangan perda menjadi perda				95	100	100		6,25	100	100	
	Persentase temuan hasil pengawasan yang menjadi kebijakan				95	100	100		3,57	100	100	
	Persentase				100	100	100		3,6	100	100	

	ketepatan penganggar an dengan perencanaa n											
	Nilai IKM											
1.1	Indikator Program											
	Persentase pelaksanaa n tugas DPRD				100	100	100		4,17	100	100	

Dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program, realisasi capaian kinerja di atas 93%. Hal ini menunjukkan tepatnya perencanaan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik sehingga keluaran (output) maksimal. Sedangkan untuk indikator program Persentase penyelesaian raperda dari target 90% tercapai 88%, hal ini dikarenakan kurangnya waktu pembahasan dan menunggu peraturan terbaru terkait dengan raperda yang dibahas supaya tidak terjadi tumpang tindih.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dari target/sasaran sebesar 100% selama 1 (satu) tahun anggaran dan telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Juli 2023 sebesar 30,43%. Hal itu menunjukkan bahwa penyerapan masih rendah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2023 sehingga penyerapan kinerja dan keuangan masih rendah diidentifikasi sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur

- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
2. Ancaman/Tantangan :
- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
 - b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
 - c. Masih banyaknya hambatan – hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.
- C. Dari kekuatan dan kelemahan faktor internal serta peluang dan tantangan faktor eksternal tersebut di atas dapat disimpulkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, sebagai berikut:

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS
Belum optimalnya kinerja DPRD	belum optimalnya pelaksanan tugas dan fungsi DPRD	belum optimalnya kinerja DPRD dalam penyusunan perda	
Belum optimalnya fungsi legislasi		belum optimalnya pelaksanaan tugas propemperda dalam pembentukan peraturan daerah	
Belum optimalnya fungsi anggaran		belum optimalnya pembahasan raperda	
belum optimalnya fungsi pengawasan		belum maksimalnya pelaksanaan tugas kedewanan dalam pengawalan hasil audiensi	
		masih dominannya media offline dalam penyampaian publikasi yang cenderung inefisien	
		belum maksimalnya penyerapan hasil	

		audiensi (demo, dengar pendapat) ke dalam kebijakan daerah	
		belum maksimalnya penerapan hasil penghimpunan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah	
		belum maksimalnya pengawasan kinerja perangkat daerah oleh DPRD (Komisi yang membidangi)	
		masih adanya hasil reses yang belum sesuai dengan prioritas daerah	
		masih rendahnya fungsi pengawasan oleh BK DPRD	
		masih rendahnya fungsi pengawasan oleh BK DPRD	
		masih rendahnya tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja dalam kebijakan daerah	
		masih rendahnya tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja dalam kebijakan daerah	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai peraturan-

peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra tahun 2024 Kabupaten Pati

Perangkat Daerah SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD (renwal)					Hasil Analisis Kebutuhan (ambil dr tabel 4.1 kolom 6)					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set DPRD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan		47.723.032.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set DPRD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan		48.557.181.050,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 dokumen	12.700.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 dokumen	58.487.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Set DPRD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	7 dokumen	8.950.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Set DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	55.484.900,00	

	Daerah		Daerah			Daerah		Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	3.750.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	3.003.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	42 dokumen	3.748.271.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	42 dokumen	2.867.930.500,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	3.458.596.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	2.662.548.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	285.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	200.796.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	4.675.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	4.586.500,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 dokumen	255.987.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 dokumen	273.987.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	255.987.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	273.987.000,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	160 paket	949.520.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	160 paket	958.943.150,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 paket	35.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 paket	39.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	914.520.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	919.943.150,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah	2656 dokumen	3.163.950.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah	2656 dokumen	2.613.425.500,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	24 paket	69.150.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	24 paket	79.410.000,0 0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	113.000.000,0 0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	1 paket	141.360.000, 00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	115.000.000,0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	6 paket	125.900.000, 00	
	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Set DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	192.950.000,0 0	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Set DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediaka n	13 paket	239.641.000, 00	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	354.850.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	12 dokumen	353.967.000,00	
	Penyediaan bahan/material	Set DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	76 paket	131.000.000,00	Penyediaan bahan/material	Set DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	76 paket	131.675.000,00	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Set DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	423.500.000,00	Fasilitasi kunjungan tamu	Set DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	570.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.754.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	961.472.500,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2500 dokumen	10.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	2500 dokumen	10.000.000,00	

			pada SKPD					Dinamis pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set DPRD	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	912.000.000, 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set DPRD	Jumlah Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	3 unit	781.902.000 ,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	912.000.000,0 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n	3 unit	781.902.000, 00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set DPRD	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 laporan	1.496.150.00 0,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set DPRD	Jumlah jasa penunjang urusan pemerinta han daerah	36 laporan	1.525.455.0 00,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	73.150.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa	12 laporan	75.500.000,0 0	

								Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	323.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	322.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.127.955.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set DPRD	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	45 unit	1.236.099.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set DPRD	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	45 unit	2.139.512.500,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	182.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	307.290.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	559.099.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	769.550.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	215.250.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Gedung Kantor & Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	783.802.500,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	279.750.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	278.870.000,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Set DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	300 orang	35.454.850.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Set DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	300 orang	36.707.037.500,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Set DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	34.850.000.000,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Set DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	35.829.537.500,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	499.850.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas & Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	777.500.000,00	

	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	105.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	100.000.000,00	
	Layanan Administrasi DPRD	Set DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	12 laporan	493.505.500,00	Layanan Administrasi DPRD	Set DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	12 laporan	630.500.000,00	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	493.505.500,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	630.500.000,00	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Set DPRD	PROSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		27.751.800.500,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Set DPRD	PROSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		24.857.876.950,00	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	20 dokumen	2.158.250.000,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	20 dokumen	4.243.878.500,00	
	Penyusunan dan Pembahasan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan	4 dokumen	504.500.000,00	Penyusunan dan Pembahasan Program	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil	4 dokumen	600.000.000,00	

	Program Pembentukan Peraturan Daerah		Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Pembentukan Peraturan Daerah		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 dokumen	1.429.500.000,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 dokumen	578.000.000,00	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 dokumen	100.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 dokumen	2.907.688.500,00	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	5 dokumen	150.000.000,00	

								yang Difasilitasi			
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	24.250.000,00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	8.190.000,00	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Set DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD	50 orang	1.075.000.00 0,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Set DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti program peningkat an kapasitas DPRD	50 orang	5.126.253.4 00,00	
	Orientasi DPRD	Set DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	50 dokumen	1.075.000.000 ,00	Orientasi DPRD	Set DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelengg araan orientasi DPRD	50 dokumen	612.125.000, 00	
	Pendalaman Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	312 dokumen	3.547.500.000 ,00	Pendalaman Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalama n Tugas DPRD	312 dokumen	2.604.518.00 0,00	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah,	12 dokumen	972.350.000,0 0	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk	12 dokumen	1.424.951.00 0,00	

			Publikasi dan Dokumentasi Dewan					Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	14 orang	31.457.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	14 orang	41.300.000,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 orang	385.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 orang	386.400.000,00	
	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	53.160.000,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	52.900.000,00	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 dokumen	5.100.000,00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 dokumen	4.059.400,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Set DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pokir	150 dokume n	3.423.850.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Set DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pokir	150 dokume n	3.422.186.850,00	

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Set DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	150 dokumen	5.100.000,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Set DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	150 dokumen	4.900.000,00	
	Pelaksanaan Reses	Set DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3.418.750.000,00	Pelaksanaan Reses	Set DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3.417.286.850,00	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	320.120.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	370.000.000,00	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	50.000.000,00	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	270.120.000,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	320.000.000,00	

	Fasilitasi Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	57 dokumen	14.121.358.500,00	Fasilitasi Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	57 dokumen	9.783.213.700,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	12.091.033.500,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	7.611.538.700,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	24 laporan	249.250.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	24 laporan	200.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	1.104.875.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	1.164.875.000,00	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	10.950.000,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	12 dokumen	10.800.000,00	

								Tugas Pimpinan DPRD			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	665.250.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	796.000.000,00	
	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Set DPRD	Jumlah hasil pengawasan yang menjadi kebijakan	72 dokume n	1.046.530.000,00	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Set DPRD	Jumlah hasil pengawas an yang menjadi kebijakan	72 dokume n	828.211.500,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 laporan	204.150.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerinta han Bidang Pemerinta han dan Hukum	12 laporan	178.504.500,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 laporan	305.870.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerinta han	12 laporan	229.821.000,00	

								Bidang Infrastruktur			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Set DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	265.450.000,0 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Set DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	214.469.000, 00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	245.760.000,0 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	194.305.000, 00	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	1 dokumen	15.150.000,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	1 dokumen	4.111.000,00	

								Badan Pemeriksa Keuangan			
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 dokumen	10.150.000,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasa n Penggunaa n Anggaran	4 dokumen	7.001.000,00	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Set DPRD	Efisiensi waktu pembahasan	7 dokume n	1.075.000.00 0,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Set DPRD	Efisiensi waktu pembahas an	7 dokume n	1.134.133.0 00,00	
	Pembahasan APBD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	7 dokumen	1.075.000.000 ,00	Pembahasan APBD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahas an APBD	7 dokumen	1.134.133.00 0,00	
					75.474.833.0 00,00					73.415.058. 000,00	

Pagu anggaran pada saat rancangan awal RKPD sebesar R75.474.833.000,00 dan pagu anggaran pada saat rancangan akhir rencana kerja 2024 sebesar Rp73.415.058.000,00 terdapat selisih pagu sebesar Rp2.059.775,00 selisih tersebut disebabkan oleh berkurangnya belanja gaji dan tunjangan ASN karena pensiun, pengurangan belanja modal dan pengurangan belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk anggaran sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan belum final karena masih menunggu tahap penginputan pokok-pokok pikiran DPRD. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap bertambahnya total pagu indikatif Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 dari rancangan akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan Rencana Kerja.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang RKPD kecamatan, khususnya usulan program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan sudah masuk dalam rekapan usulan pada perangkat daerah terkait, sedangkan usulan program dan kegiatan melalui renja kecamatan sementara belum ada.

Sekretariat DPRD sebagai fungsi fasilitasi DPRD bertugas membantu DPRD dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan menyerap aspirasi dalam kegiatan yang akan dibahas melalui Pemerintah Kabupaten Pati.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Setwan			
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	Setwan			
12.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 paket	untuk anggaran belum final, masih menunggu penambahan dari anggaran pokok DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional. Seperti yang tercantum dalam tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Tengah yaitu :

- a) Fokus Arah kebijakan Pembangunan Nasional.
 - 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam Arah Pembangunan Nasional pada Rancangan RPJMN 2020-2024 yaitu:
 - 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
 - 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
 - 3) Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
 - 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
 - 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
 - 7) Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- b) Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 di arahkan untuk Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, dengan prioritas daerah :
 - 1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
 - 2) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - 3) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;

- 4) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan mengacu kepada isu-isu strategis yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang berkompeten, dengan target Renja Tahun 2024 yaitu Persentase Kinerja Fungsi DPRD sebesar 100%.

Sedangkan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Pati, maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan ;
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD , dengan target Renja Tahun 2024 yaitu:
 1. Persentase rancangan perda menjadi perda sebesar 100%
 2. Persentase temuan hasil pengawasan yang menjadi kebijakan 100%
 3. Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan 100%

Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal	1. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan 2. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; 2. Peningkatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD; 3. Peningkatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; 4. Peningkatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD; 5. Peningkatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus; 6. Peningkatan Penyusunan Kode Etik DPRD; 7. Peningkatan Pengawasan Kode Etik DPRD; 8. Peningkatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; 9. Penguatan Pelaksanaan Reses; 10. Penguatan Orientasi DPRD; 11. Penguatan Pendalaman Tugas DPRD; 12. Peningkatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan; 13. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; 14. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; 15. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; 16. Peningkatan Penyusunan Program Kerja DPRD; 17. Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; 18. Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;

			19. Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat ; 20. Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ; 21. Peningkatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ; 22. Peningkatan Pengawasan Penggunaan Anggaran ; 23. Penguatan Pembahasan APBD; 24. Penguatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 25. Peningkatan Pembahasan Rancangan Perda; 26. Penguatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan; 27. Peningkatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik; 28. Peningkatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
--	--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran maka disusun program , kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 ada 4 (empat) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari keempat isu strategis tersebut, Sekretariat DPRD mendukung isu ke 4 yaitu : Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)
 - 1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat
 - 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
 - 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
 - 1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah
 - 1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
Meningkatnya kesempatan atau peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja.

3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
 - 3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
 - 4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;
 - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
 - 6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, Sekretariat DPRD mendukung tujuan ke 6 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan sasaran “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten” dan akan dilaksanakan melalui program – program Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai berikut:

PROGRAM I : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan/Material
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

PROGRAM II : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Terdiri dari 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD

2. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Orientasi DPRD
- 2) Pendalaman Tugas DPRD
- 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 4) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 5) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 6) Penyusunan Program Kerja DPRD
- 7) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2) Pelaksanaan Reses

4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD
- 2) Pengawasan Kode Etik DPRD

5. Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

6) Pengawasan Penggunaan Anggaran

7. Pembahasan Kebijakan Anggaran

1) Pembahasan APBD

Untuk Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mempunyai 2 (dua) Program , 17 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp73.415.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan anggaran sebesar Rp48.557.181.050,00
- II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD dengan anggaran sebesar Rp24.857.876.950,00

Pagu indikatif di rancangan awal renja sebesar Rp75.474.833.000,00 Dan pada rancangan penetapan akhir renja sebesar Rp73.415.058.000,00. Selisih pagu antara rencana awal dan rencana akhir renja disebabkan oleh berkurangnya belanja gaji dan tunjangan ASN karena pensiun, pengurangan belanja modal dan pengurangan belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk anggaran sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan belum final karena masih menunggu tahap penginputan pokok-pokok pikiran DPRD. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap bertambahnya total pagu indikatif Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 dari rancangan akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga menentukan penyesuaian pagu.

Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rumusan Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pati

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) disesuaikan dengan SIPD				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	SETWAN		48.557.181.0 50,00	APBD			54,758,296,500
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SETWAN	19 dokumen	58.487.900,0 0	APBD		19 dokumen	63.848.000,00
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETWAN	7 dokumen	55.484.900,00	APBD		7 dokumen	59.495.000,00
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SETWAN	12 laporan	3.003.000,00	APBD		12 laporan	4.353.000,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi	SETWAN	58 dokumen	2.867.930.50 0,00	APBD		58 dokumen	3.445.779.000,0 0

					Perangkat Daerah	keuangan							
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SETWAN	28 orang	2.662.548.000,00	APBD		28 orang	3.223.390.000,00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SETWAN	12 dokumen	200.796.000,00	APBD		12 dokumen	217.115.000,00
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SETWAN	18 laporan	4.586.500,00	APBD		18 laporan	5.274.000,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	SETWAN	12 dokumen	273.987.000,00	APBD		12 dokumen	292.000.000,00
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SETWAN	12 dokumen	273.987.000,00	APBD		12 dokumen	292.000.000,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	SETWAN	160 paket	958.943.150,00	APBD		160 paket	1.096.548.000,00

4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SETWAN	80 paket	39.000.000,00	APBD		80 paket	44.850.000,00
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETWAN	80 orang	919.943.150,00	APBD		80 orang	1.051.698.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung administrasi perangkat daerah	SETWAN	166 dokumen	2.613.425.500,00	APBD		166 dokumen	2.970.726.000,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SETWAN	24 paket	79.410.000,00	APBD		24 paket	90.171.000,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SETWAN	1 paket	141.360.000,00	APBD		1 paket	161.000.000,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SETWAN	6 paket	125.900.000,00	APBD		6 paket	168.935.000,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SETWAN	13 paket	239.641.000,00	APBD		13 paket	236.802.000,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	SETWAN	12 dokumen	353.967.000,00	APBD		12 dokumen	407.000.000,00

					undangan	Undangan yang Disediakan							
4	02	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	SETWAN	76 paket	131.675.000,00	APBD		76 paket	191.618.000,00
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SETWAN	12 laporan	570.000.000,00	APBD		12 laporan	598.000.000,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETWAN	12 laporan	961.472.500,00	APBD		12 laporan	1.105.700.000,00
4	02	01	2.06	11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dokumen	10.000.000,00	APBD		12 dokumen	11.500.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SETWAN	3 unit	781.902.000,00	APBD		3 unit	1.495.400.000,00
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SETWAN	3 unit	781.902.000,00	APBD		3 unit	1.495.400.000,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	SETWAN	36 laporan	1.525.455.000,00	APBD		36 laporan	1.752.835.000,00

4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETWAN	12 laporan	75.500.000,00	APBD		12 laporan	86.825.000,00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SETWAN	12 laporan	322.000.000,00	APBD		12 laporan	370.300.000,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SETWAN	12 laporan	1.127.955.000,00	APBD		12 laporan	1.295.710.000,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	SETWAN	83 unit	2.139.512.500,00	APBD		83 unit	2.588.632.000,00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SETWAN	5 unit	307.290.000,00	APBD		5 unit	462.950.000,00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SETWAN	51 unit	769.550.000,00	APBD		51 unit	884.982.000,00

					Lapangan								
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SETWAN	1 unit	783.802.500,00	APBD		1 unit	920.000.000,00
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETWAN	26 unit	278.870.000,00	APBD		26 unit	320.700.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	SETWAN	300 orang	36.707.037.500,00	APBD		300 orang	41.795.735.000,00
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	SETWAN	50 orang	35.829.537.500,00	APBD		50 orang	40.815.000.000,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	SETWAN	200 paket	777.500.000,00	APBD		200 paket	865.735.000,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	SETWAN	50 orang	100.000.000,00	APBD		50 orang	115.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	SETWAN	12 laporan	630.500.000,00	APBD		12 laporan	725.000.000,00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	SETWAN	12 laporan	630.500.000,00	APBD		12 laporan	725.000.000,00

					Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN		24.857.876.950,00	APBD			28.023.500.000,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	SETWAN	24 dokumen	4.243.878.500,00	APBD		24 dokumen	4.804.295.000,00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SETWAN	4 dokumen	600.000.000,00	APBD		4 dokumen	615.000.000,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SETWAN	12 dokumen	578.000.000,00	APBD		12 dokumen	549.700.000,00
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	SETWAN	2 dokumen	2.907.688.500,00	APBD		2 dokumen	3.454.810.000,00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	SETWAN	5 dokumen	150.000.000,00	APBD		5 dokumen	172.500.000,00
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	SETWAN	1 dokumen	8.190.000,00	APBD		1 dokumen	12.285.000,00

4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD	SETWAN	50 orang	5.126.253.400,00	APBD		50 orang	6.125.749.000,00
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	SETWAN	50 dokumen	612.125.000,00	APBD		50 dokumen	703.943.000,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	SETWAN	312 dokumen	2.604.518.000,00	APBD		312 dokumen	2.995.195.000,00
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SETWAN	12 dokumen	1.424.951.000,00	APBD		12 dokumen	1.870.871.000,00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SETWAN	14 orang	41.300.000,00	APBD		14 orang	47.495.000,00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	SETWAN	12 orang	386.400.000,00	APBD		12 orang	442.750.000,00
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SETWAN	12 dokumen	52.900.000,00	APBD		12 dokumen	60.835.000,00
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	SETWAN	2 dokumen	4.059.400,00	APBD		2 dokumen	4.660.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pokir	SETWAN	153 dokumen	3.422.186.850,00	APBD		153 dokumen	3.935.435.000,00

					Masyarakat								
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun		150 dokumen	4.900.000,00	APBD		150 dokumen	5.635.000,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	SETWAN	3 dokumen	3.417.286.850,00	APBD		3 dokumen	3.929.800.000,00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	SETWAN	4 laporan	370.000.000,00	APBD		4 laporan	368.000.000,00
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	SETWAN	1 dokumen	50.000.000,00	APBD		1 dokumen	57.500.000,00
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	SETWAN	4 laporan	320.000.000,00	APBD		4 laporan	310.500.000,00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	SETWAN	57 dokumen	9.783.213.700,00	APBD		57 dokumen	10.550.420.000,00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SETWAN	12 dokumen	7.611.538.700,00	APBD		12 dokumen	8.099.900.000,00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	SETWAN	24 laporan	200.000.000,00	APBD		24 laporan	230.000.000,00
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	SETWAN	12 dokumen	1.164.875.000,00	APBD		12 dokumen	1.293.600.000,00

						Badan Musyawarah							
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SETWAN	12 dokumen	10.800.000,00	APBD		12 dokumen	12.420.000,00
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SETWAN	6 dokumen	796.000.000,00	APBD		6 dokumen	914.500.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah hasil pengawasan yang menjadi kebijakan	SETWAN	53 dokumen	828.211.500,00	APBD		53 dokumen	946.601.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SETWAN	12 laporan	178.504.500,00	APBD		12 laporan	205.280.000,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SETWAN	12 laporan	229.821.000,00	APBD		12 laporan	258.400.000,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SETWAN	12 laporan	214.469.000,00	APBD		12 laporan	246.693.000,00

4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SETWAN	12 laporan	194.305.000,0 0	APBD		12 laporan	223.450.000,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SETWAN	1 dokumen	4.111.000,00	APBD		1 dokumen	4.727.000,00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	SETWAN	4 dokumen	7.001.000,00	APBD		4 dokumen	8.051.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Efisiensi waktu pembahasan	SETWAN	7 dokumen	1.134.133.00 0,00	APBD		7 dokumen	1.293.000.000,0 0
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	SETWAN	7 dokumen	1.134.133.000 ,00	APBD		7 dokumen	1.293.000.000,00
									73.415.058.0 00,00				84.250.003.000, 00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan untuk Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

PROGRAM I : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan/Material
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

PROGRAM II : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Terdiri dari 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD

2. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Orientasi DPRD
- 2) Pendalaman Tugas DPRD
- 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 4) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 5) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 6) Penyusunan Program Kerja DPRD
- 7) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2) Pelaksanaan Reses

4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- 1) Penyusunan Kode Etik
- 2) Pengawasan Kode Etik DPRD

5. Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran

7. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 1) Pembahasan APBD

Sedangkan untuk pendanaan dalam rancangan akhir renja ini seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp73.415.058.000,00 Namun untuk anggaran belum final, masih menunggu penambahan dari anggaran pokok DPRD. Tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah/Bankeu Provinsi Jawa Tengah atau dari APBN/DAK.

Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan kerangka pendanaan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pati

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) disesuaikan dengan SIPD				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	SETWAN		48.557.181.050,00	APBD			54,758,296,500
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SETWAN	19 dokumen	58.487.900,00	APBD		19 dokumen	63.848.000,00
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETWAN	7 dokumen	55.484.900,00	APBD		7 dokumen	59.495.000,00
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SETWAN	12 laporan	3.003.000,00	APBD		12 laporan	4.353.000,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi	SETWAN	58 dokumen	2.867.930.500,00	APBD		58 dokumen	3.445.779.000,00

					Perangkat Daerah	keuangan							
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SETWAN	28 orang	2.662.548.000,00	APBD		28 orang	3.223.390.000,00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SETWAN	12 dokumen	200.796.000,00	APBD		12 dokumen	217.115.000,00
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SETWAN	18 laporan	4.586.500,00	APBD		18 laporan	5.274.000,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	SETWAN	12 dokumen	273.987.000,00	APBD		12 dokumen	292.000.000,00
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SETWAN	12 dokumen	273.987.000,00	APBD		12 dokumen	292.000.000,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	SETWAN	160 paket	958.943.150,00	APBD		160 paket	1.096.548.000,00

4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SETWAN	80 paket	39.000.000,00	APBD		80 paket	44.850.000,00
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETWAN	80 orang	919.943.150,00	APBD		80 orang	1.051.698.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung administrasi perangkat daerah	SETWAN	166 dokumen	2.613.425.500,00	APBD		166 dokumen	2.970.726.000,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SETWAN	24 paket	79.410.000,00	APBD		24 paket	90.171.000,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SETWAN	1 paket	141.360.000,00	APBD		1 paket	161.000.000,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SETWAN	6 paket	125.900.000,00	APBD		6 paket	168.935.000,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SETWAN	13 paket	239.641.000,00	APBD		13 paket	236.802.000,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	SETWAN	12 dokumen	353.967.000,00	APBD		12 dokumen	407.000.000,00

					undangan	Undangan yang Disediakan							
4	02	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	SETWAN	76 paket	131.675.000,00	APBD		76 paket	191.618.000,00
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SETWAN	12 laporan	570.000.000,00	APBD		12 laporan	598.000.000,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETWAN	12 laporan	961.472.500,00	APBD		12 laporan	1.105.700.000,00
4	02	01	2.06	11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dokumen	10.000.000,00	APBD		12 dokumen	11.500.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SETWAN	3 unit	781.902.000,00	APBD		3 unit	1.495.400.000,00
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SETWAN	3 unit	781.902.000,00	APBD		3 unit	1.495.400.000,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	SETWAN	36 laporan	1.525.455.000,00	APBD		36 laporan	1.752.835.000,00

4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETWAN	12 laporan	75.500.000,00	APBD		12 laporan	86.825.000,00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SETWAN	12 laporan	322.000.000,00	APBD		12 laporan	370.300.000,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SETWAN	12 laporan	1.127.955.000,00	APBD		12 laporan	1.295.710.000,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	SETWAN	83 unit	2.139.512.500,00	APBD		83 unit	2.588.632.000,00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SETWAN	5 unit	307.290.000,00	APBD		5 unit	462.950.000,00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SETWAN	51 unit	769.550.000,00	APBD		51 unit	884.982.000,00

					Lapangan								
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SETWAN	1 unit	783.802.500,00	APBD		1 unit	920.000.000,00
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETWAN	26 unit	278.870.000,00	APBD		26 unit	320.700.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	SETWAN	300 orang	36.707.037.500,00	APBD		300 orang	41.795.735.000,00
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	SETWAN	50 orang	35.829.537.500,00	APBD		50 orang	40.815.000.000,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	SETWAN	200 paket	777.500.000,00	APBD		200 paket	865.735.000,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	SETWAN	50 orang	100.000.000,00	APBD		50 orang	115.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	SETWAN	12 laporan	630.500.000,00	APBD		12 laporan	725.000.000,00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	SETWAN	12 laporan	630.500.000,00	APBD		12 laporan	725.000.000,00

					Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN		24.857.876.950,00	APBD			28.023.500.000,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	SETWAN	24 dokumen	4.243.878.500,00	APBD		24 dokumen	4.804.295.000,00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SETWAN	4 dokumen	600.000.000,00	APBD		4 dokumen	615.000.000,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SETWAN	12 dokumen	578.000.000,00	APBD		12 dokumen	549.700.000,00
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	SETWAN	2 dokumen	2.907.688.500,00	APBD		2 dokumen	3.454.810.000,00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	SETWAN	5 dokumen	150.000.000,00	APBD		5 dokumen	172.500.000,00
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	SETWAN	1 dokumen	8.190.000,00	APBD		1 dokumen	12.285.000,00

4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD	SETWAN	50 orang	5.126.253.400,00	APBD		50 orang	6.125.749.000,00
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	SETWAN	50 dokumen	612.125.000,00	APBD		50 dokumen	703.943.000,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	SETWAN	312 dokumen	2.604.518.000,00	APBD		312 dokumen	2.995.195.000,00
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SETWAN	12 dokumen	1.424.951.000,00	APBD		12 dokumen	1.870.871.000,00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SETWAN	14 orang	41.300.000,00	APBD		14 orang	47.495.000,00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	SETWAN	12 orang	386.400.000,00	APBD		12 orang	442.750.000,00
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SETWAN	12 dokumen	52.900.000,00	APBD		12 dokumen	60.835.000,00
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	SETWAN	2 dokumen	4.059.400,00	APBD		2 dokumen	4.660.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pokir	SETWAN	153 dokumen	3.422.186.850,00	APBD		153 dokumen	3.935.435.000,00

					Masyarakat								
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun		150 dokumen	4.900.000,00	APBD		150 dokumen	5.635.000,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	SETWAN	3 dokumen	3.417.286.850,00	APBD		3 dokumen	3.929.800.000,00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	SETWAN	4 laporan	370.000.000,00	APBD		4 laporan	368.000.000,00
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	SETWAN	1 dokumen	50.000.000,00	APBD		1 dokumen	57.500.000,00
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	SETWAN	4 laporan	320.000.000,00	APBD		4 laporan	310.500.000,00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	SETWAN	57 dokumen	9.783.213.700,00	APBD		57 dokumen	10.550.420.000,00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SETWAN	12 dokumen	7.611.538.700,00	APBD		12 dokumen	8.099.900.000,00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	SETWAN	24 laporan	200.000.000,00	APBD		24 laporan	230.000.000,00
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	SETWAN	12 dokumen	1.164.875.000,00	APBD		12 dokumen	1.293.600.000,00

						Badan Musyawarah							
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SETWAN	12 dokumen	10.800.000,00	APBD		12 dokumen	12.420.000,00
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SETWAN	6 dokumen	796.000.000,00	APBD		6 dokumen	914.500.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah hasil pengawasan yang menjadi kebijakan	SETWAN	53 dokumen	828.211.500,00	APBD		53 dokumen	946.601.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SETWAN	12 laporan	178.504.500,00	APBD		12 laporan	205.280.000,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SETWAN	12 laporan	229.821.000,00	APBD		12 laporan	258.400.000,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SETWAN	12 laporan	214.469.000,00	APBD		12 laporan	246.693.000,00

4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SETWAN	12 laporan	194.305.000,0 0	APBD		12 laporan	223.450.000,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SETWAN	1 dokumen	4.111.000,00	APBD		1 dokumen	4.727.000,00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	SETWAN	4 dokumen	7.001.000,00	APBD		4 dokumen	8.051.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Efisiensi waktu pembahasan	SETWAN	7 dokumen	1.134.133.00 0,00	APBD		7 dokumen	1.293.000.000,0 0
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	SETWAN	7 dokumen	1.134.133.000 ,00	APBD		7 dokumen	1.293.000.000,00
									73.415.058.0 00,00				84.250.003.000, 00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2024.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi pada setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Diharapkan semua sumber daya Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

Pj. BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI ANGGORO